



## **Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers**

*"Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan XIII"*  
17-18 Oktober 2023  
Purwokerto

---

**"Tema: 8 Pengabdian Kepada Masyarakat"**

### **PEMBERDAYAAN KEPALA DESA DI KABUPATEN BANYUMAS BERDASARKAN ASEAN + 3 VILLAGE LEADERS PROGRAMME**

**Tundjung Linggarwati<sup>1</sup>, Agus Haryanto<sup>2</sup>, dan Dias Pabyantara SM<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia**

<sup>2</sup>**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia**

<sup>3</sup>**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia**

#### **ABSTRAK**

Globalisasi menuntut kesiapan di berbagai wilayah termasuk desa yang juga terimbas oleh globalisasi, untuk itu Kementerian Desa menyelenggarakan berbagai program pembangunan desa agar desa mampu mandiri dan sejahtera. Kerjasama ASEAN dan mitranya (ASEAN plus three) diwujudkan dalam model pembangunan desa yang disebut sebagai ASEAN +3 Village Leaders Programme (ASEAN +3 VLP), dimana program ini mengacu pada pencapaian tujuan kemandirian dan kesejahteraan desa dengan memaksimalkan peran kepala desa sebagai tokoh sentral dalam pembangunan desa. Mitra dari kegiatan ini adalah Paguyuban Kepala Desa Banyumas "Satria Praja" yang sebagian besar mengalami permasalahan yang sama dalam pembangunan desa antara lain pemetaan potensi desa, kapasitas kepala desa yang belum maksimal dalam pengambilan kebijakan serta kurang wawasan tentang model pembangunan desa. Kegiatan ini akan dijalankan dengan metode sosialisasi dan pemberian wawasan terkait pembangunan pedesaan di negara anggota ASEAN + 3 serta rencana tindak lanjut bagi peningkatan kapasitas para kepala desa.

Kata kunci : Banyumas, ASEAN, kepala desa, pemberdayaan

#### **ABSTRACT**

*Globalization demands readiness in various regions, including villages which are also affected by globalization, for this reason the Ministry of Villages organizes various village development programs so that villages can be independent and prosperous. Cooperation between ASEAN and its partners (ASEAN plus three) is realized in a village development model called the ASEAN +3 Village Leaders Program (ASEAN +3 VLP), where this program refers to achieving the goals of village independence*



## **Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers**

*"Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan XIII"*

17-18 Oktober 2023

Purwokerto

*and prosperity by maximizing the role of the village leaders as a central figure in village development. The partner of this activity is the Banyumas Village Heads Association "Satria Praja", most of which experience the same problems in village development, including mapping village potential, the capacity of village leaders not being maximized in policy making and a lack of insight into village development models. This activity will be carried out using socialization methods and providing insight regarding rural development in ASEAN + 3 member countries as well as follow-up plans to increase the capacity of village leaders*

*Keywords: Banyumas, ASEAN, village leader, empowerment*

### **PENDAHULUAN**

Definisi "pedesaan" berbeda di setiap negara. Di Jepang misalnya, kata ini didefinisikan berdasarkan populasi kepadatan penduduk. Di Jepang, istilah desa menunjukkan "daerah dengan lebih dari 5.000 orang, yang terdiri dari setiap kabupaten dengan kepadatan penduduk lebih dari 4.000 per kilometer persegi". Di Indonesia, berdasarkan UU no. 6 tahun 2014, "Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Kerjasama ASEAN di bidang pengembangan pedesaan salah satunya adalah The ASEAN+3 Village Leaders Exchange Programme, yaitu sebuah program pertukaran pengalaman kepala desa antara 10 anggota ASEAN dan tiga negara mitra, yaitu China, Jepang, dan Korea Selatan. Beberapa isu yang diangkat dalam program ini adalah bagaimana kepala desa memiliki peran dalam mengembangkan komunitas, mengurangi kemiskinan, dan mendukung pemberdayaan masyarakat desa (asean.org,2018) Program ini telah dilaksanakan secara regular sejak tahun 2013 dan ASEAN memasukkan program ini dalam agenda tahunan ASEAN. Sebagai contoh "the ASEAN Framework Action Plan on Rural Development and Poverty Eradication 2011-2015 and 2016-2020" memasukkan kegiatan program pertukaran kepala desa sebagai salah satu bagiannya. Dalam pertemuan kepala desa di Shanghai, tahun 2016, Deputi Sekretaris Jenderal ASEAN bidang Sosial budaya menyatakan bahwa "This programme is timely and relevant in this regional context as it underlines the complementarity between the implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development and the ASEAN Community Vision 2025 to uplift the living standards of our people, while leaving no one behind".

Dalam pandangan pemerintah Indonesia, program ASEAN+3 Village Leader Exchange mendapatkan sambutan positif. Sekjen Kemendes PDTT, Anwar Sanusi, misalnya mengomentari program tersebut di tahun 2019 dengan menyatakan bahwa "Saya yakin dengan forum ini akan tercapai banyak sekali kesempatan untuk saling bertukar pikiran mengenai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dari hasil forum ini akan diciptakan sebuah jejaring kerja antara pemerintah yang mengikuti pelatihan ini. Semoga ke depan mereka saling tukar menukar ide dan gagasan serta inovasi pedesaan sehingga pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa bisa kita tingkatkan" (liptan 6.com, 2020)

Bapak Rasito, kepala desa Pandak, Banyumas merupakan salah satu kandidat yang dipilih oleh Kementerian Desa pada tahun 2018 untuk menghadiri program ASEAN plus Three Village Leader Exchange Programme (ASEAN+3 VLEP). Desa Pandak melakukan inovasi di berbagai aspek kehidupan masyarakatnya, termasuk memperhatikan pembangunan sumber daya manusia (SDM). Sejumlah upaya dilakukan untuk peningkatan kualitas hidup, baik dari sisi ekonomi, sosial, kebersihan, dan kesehatan. Realisasinya sebagian besar dilakukan dengan memanfaatkan dana desa. Wawancara dengan beliau yang sekaligus Ketua Paguyuban Kepala Desa Banyumas "Satria Praja" ini menjelaskan adanya program inovasi yang dilakukan oleh desa Pandak pasca dirinya mendapat



## ***Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers***

*"Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan XIII"*

*17-18 Oktober 2023*

*Purwokerto*

---

pengalaman dari program tersebut. Dari data di lapangan, yang merupakan hasil penelitian kami mengenai "Model Pembangunan Desa Berdasarkan ASEAN Plus Three Village Leaders Exchange Programme", kami mendapatkan informasi telah masuk dalam 10 besar PADes se-Indonesia. RAPBDes Desa Pandak mencapai lebih dari 5 Milyar. Bahkan, menurut Sekcam Baturaden, Desa Pandak sedang membangun gedung balai latihan kerja (BLK) yang nantinya warga akan dilatih beragam keterampilan, seperti pembuatan rambut dan bulu mata palsu. Dari BLK ini, diperkirakan dapat menyerap 100–200 orang tenaga kerja. Selain itu, Desa Pandak juga telah menghasilkan lebih dari 40 sarjana melalui program desa.

"Satria Praja" merupakan Paguyuban Kepala Desa di Kabupaten Banyumas yang merupakan ajang berbagi pengalaman dan membahas berbagai permasalahan yang secara umum terjadi berhubungan dengan tugas-tugas kepala desa dalam membangun desanya baik dalam upaya mengatasi kemiskinan, membuat kebijakan, maupun mengidentifikasi permasalahan-permasalahan pembangunan di desanya. Namun dalam berbagai forum dan diskusi antar anggota paguyuban selama ini mereka belum memahami berbagai model pembangunan desa yang tepat ataupun yang bisa dijadikan panduan bagi pembangunan desanya. Terlebih lagi di era globalisasi yang mengharuskan kepala desa juga terbuka pada nilai-nilai global, kesiapan untuk menghadapi peluang dan tantangan globalisasi menjadikan permasalahan yang krusial dan banyak desa yang belum mampu beradaptasi dengan situasi ini. (Rasito, 2020)

Secara umum, permasalahan yang dihadapi oleh para kepala desa di Kabupaten Banyumas adalah para kepala desa belum sepenuhnya mampu mengidentifikasi dan melakukan pemetaan potensi desanya, para kepala desa juga belum memaksimalkan perannya dalam pengambilan kebijakan yang efektif, kepala desa juga belum sepenuhnya mampu mengatasi berbagai persoalan di desa. Terkait dengan ASEAN, kepala desa belum memahami model pembangunan desa yang tepat dengan menginternalisasikan nilai-nilai internasional (dalam hal ini ASEAN) untuk mengatasi permasalahan desa dan menghadapi tantangan global.

### **METODE PENELITIAN**

Metode awal adalah wawancara dan observasi terhadap 10 kepala desa terkait kapasitas kepala desa dalam melakukan pemetaan potensi desa, mengatasi persoalan desa serta kemampuannya dalam membuat kebijakan yang efektif bagi pembangunan desanya. Wawancara juga menyangkut pengetahuan kepala desa tentang ASEAN + 3 Village Leader Program. Para kepala desa yang dilibatkan adalah kepala desa Pandak, Rempoah, Kemutug Lor, Pamijen, Cikakak, Karanggintung, Petahunan, Pasir Wetan, Pekunden dan Alas Malang. Selanjutnya dilakukan Focus Group Discussion (FGD) sebagai upaya membuka wawasan para kepala desa tentang Model Pembangunan Asean Plus Three Village Leaders Programme (ASEAN+3 VLP) yang jika dilaksanakan akan dapat mengatasi berbagai masalah pembangunan pedesaan serta penguatan kapasitas kepala desa untuk membantu kepala desa dalam memaksimalkan perannya dalam membuat kebijakan, mengidentifikasi potensi maupun permasalahan serta merancang problem solving bagi permasalahan yang ada dengan berbagai terkait masalah yang dihadapi para kepala desa serta memahami model pembangunan pedesaan di ASEAN

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Di Indonesia, diberlakukannya Undang-Undang Desa tahun 2014 memiliki tujuan untuk memajukan perekonomian masyarakat di pedesaan, mengatasi kesenjangan pembangunan kota dan desa, memperkuat peran penduduk desa dalam pembangunan serta meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa. Untuk mencapai hal tersebut, beberapa hak dan wewenang diberikan



## **Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers**

*"Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan XIII"*  
17-18 Oktober 2023  
Purwokerto

---

kepada desa termasuk pendanaannya yang dialokasikan khusus dari APBN untuk Desa, disamping sumber pendapatan lainnya. Selanjutnya terbentuklah berbagai model pembangunan ke perdesaan seperti memfasilitasi komunitas di perdesaan, membentuk organisasi di perdesaan seperti koperasi, berbagai bantuan untuk mengatasi kemiskinan, dan sebagainya. Secara umum, ada upaya desentralisasi di desa.

Di Kabupaten Banyumas, model pembangunan pedesaan mengacu pada tujuan pembangunan berkelanjutan sesuai Surat Edaran Bupati Banyumas Nomor 1/2019 tentang penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) 2018-2023. Dalam hal ini para kepala desa dituntut untuk memiliki kemampuan menyusun peta jalan atau roadmap pembangunan desa yang mengacu pada potensi desa masing-masing dan selanjutnya mampu mengelola potensi desanya untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Desa memiliki potensi masing-masing yang tidak sama antara satu desa dengan desa lainnya dan memiliki keunikan baik dari potensi alam, maupun kehidupan masyarakatnya. Kapasitas kepala desa menjadi penting agar mampu memberdayakan masyarakat berdasarkan potensinya.

### **Identifikasi dan Pemetaan Potensi Desa**

Kegiatan yang diawali dengan tujuan mengetahui kapasitas kepala desa dalam mengidentifikasi dan melakukan pemetaan potensi desa, dilakukan pada 10 kepala desa mitra kegiatan ini yang juga tergabung dalam Satria Praja. Secara umum para kepala desa tersebut belum memahami metode yang efektif untuk mengidentifikasi potensi desa yang akan menjadi dasar bagi pengembangan desa dengan mengetahui kebutuhan yang diperlukannya. Identifikasi merupakan salah satu kegiatan menemukan, menentukan identitas dari orang, benda atau hal-hal lain termasuk diantaranya dapat dilakukan untuk potensi dan masalah yang ada di desa. Identifikasi ini dilakukan untuk mengenali dan mencatat potensi apa saja yang ada di desa dan permasalahan apa saja yang ada di desa. (masterplandes.com.2022)

Sebagian besar kepala desa belum menerapkan penggunaan metode yang sistematis. Misalnya terkait penggunaan metode 3P (*people, planet, profit*) dalam mengidentifikasi potensi desa. Berdasarkan teori pembangunan dan pengembangan wilayah yang berkelanjutan kita perlu melihat pada 3 aspek utama (*triple bottom line*) yang melatarbelakangi pembangunan berkelanjutan yang ada di suatu wilayah (Kisacik, 2017). Dalam aspek pertama (*people*) secara umum kepala desa mengalami kesulitan untuk mengetahui tentang kesiapan masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan, apakah masyarakat siap bekerjasama untuk menjalankan pembangunan desa, kesiapan masyarakat menjaga lingkungannya melestarikan warisan budaya dan kesiapan masyarakat menjalankan program-program pembangunan. Para kepala desa juga memiliki kekhawatiran terkait apakah program atau kebijakan yang dibutuhkan untuk pengembangan potensi masyarakat atau sumber daya manusia.

Aspek yang kedua (*planet*) secara umum para kepala desa mengetahui adanya potensi alam dan lingkungan di desanya. Namun para kepala desa masih harus memikirkan bagaimana membangun potensi alam dan lingkungan tersebut. Misalnya terdapat potensi alam yang bagus untuk dieksplorasi sebagai obyek wisata, namun para kepala desa masih kesulitan tentang apa saja yang harus dipersiapkan untuk mengembangkan potensi alam tersebut, apakah akses menuju lokasi sudah memadai, apakah sarana dan prasarana lain yang harus dibangun untuk mendukung dan menjamin kenyamanan dan keamanan pengunjung, apakah lingkungan sudah disiapkan untuk mengantisipasi dampak pencemaran akibat dibukanya obyek wisata. Demikian juga bagi sebagian desa yang memiliki produk-produk tertentu, apakah perlu dibuka sentra atau Kawasan industri kecil untuk pengembangan UMKM, apakah lingkungan sudah disiapkan untuk aktivitas industri kecil dengan standar yang baik danantisipasi pencemaran lingkungannya termasuk kemana limbah industrinya akan dibuang atau bagaimana memanfaatkan limbahnya. Pertanyaan-pertanyaan semacam itu sering membuat para kepala desa mengalami kesulitan.

Sementara itu berkaitan dengan aspek ketiga (*profit*) sangat berkaitan dengan sector ekonomi. Jika sebuah pembangunan tidak melihat sektor ekonomi sebagai salah satu hal penting yang dipertimbangkan, maka pembangunan dan pengembangan wilayah tidak akan berjalan dengan baik



## **Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers**

*"Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan XIII"*

17-18 Oktober 2023

Purwokerto

---

dan cenderung akan berhenti. Untuk membangun sesuatu dibutuhkan pendanaan bagi kelancaran pembangunannya, namun sangat diperlukan perencanaan yang baik agar hasil pembangunan tersebut mampu menjadi sumber penghasilan baru bagi masyarakat yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jika dinilai tidak mampu memberikan nilai tambah bagi ekonomi masyarakat, maka sudah bisa dipastikan masyarakat enggan berpartisipasi dan bahkan akan ditinggalkan. Para kades memerlukan pengetahuan dan ketrampilan untuk melakukan analisis terkait profit atau keuntungan maupun manfaat yang akan didapatkan masyarakat dalam jangka waktu tertentu, mengingat selain pendidikan para kepala desa yang beragam, pengalaman organisasi maupun pekerjaan yang ditekuni sebelum menjadi kepala desa juga sangat beragam dan sering tidak berhubungan dengan hal-hal yang terkait dengan analisis profit. Kalaupun beberapa kepala desa juga sebagai wirausaha, biasanya analisis usahanya lebih banyak dilakukan dengan perhitungan sederhana terkait kapital, biaya produksi maupun margin keuntungan. Namun jika terkait dengan pembangunan desa, banyak aspek dan harus dipertimbangkan maupun diperhitungkan.

Kurangnya kapasitas para kepala desa dalam mengidentifikasi potensi yang merujuk pada segala sesuatu yang dapat mendukung pembangunan dan dapat dikembangkan kearah yang lebih baik akan sangat berpengaruh terhadap baik atau buruknya perencanaan pembangunan dan pengembangan potensi desa itu sendiri. Artinya potensi desa tidak dapat terolah dengan baik dan kurang optimal pemanfaatannya bagi kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakat.

### **Peran kepala desa dalam pengambilan kebijakan**

Sejalan dengan kurangnya kapasitas para kepala desa untuk memetakan potensi desa dari berbagai aspeknya, seringkali berlanjut pada kesulitan untuk memecahkan permasalahan pedesaan yang dihadapinya. Permasalahan, merujuk pada segala sesuatu yang menghambat pembangunan dan pengembangan desa. Dari proses identifikasi potensi dan masalah kita dapat mengetahui kira-kira apa saja yang harus dilakukan untuk mengembangkan maupun menyelesaikan masalah yang ada di desa. Secara umum desa memiliki permasalahan mulai dari kemiskinan yang lebih tinggi, kesehatan yang rendah, konsumsi masyarakat rendah, SDM rendah, sarana dan prasarana yang lebih sulit dibandingkan kota, tingkat pendidikan rendah serta permasalahan lingkungan.

Berkaitan dengan peran kepala desa, Mintzberg (2004) menjelaskan bahwa pemimpin memiliki peran yang terbagi menjadi tiga sifat yang meliputi (1) peranan yang bersifat interpersonal yaitu sebagai *figurehead*, *leader* dan komunikator. *Figurehead* lebih kepada peran seorang pemimpin yang diharuskan untuk tampil dalam berbagai kegiatan resmi. *Leader* diartikan sebagai penggerak yang mampu memberikan motivasi terhadap bawahan melalui kecakapan komunikasi. Komunikator diartikan sebagai penghubung dalam upaya membangun kerjasama dengan berbagai pihak. (2) Peranan yang bersifat Informasional yang lebih mengarah kepada proses seseorang menerima dan menyampaikan informasi sehingga seorang pemimpin mampu berperdan sebagai pemonitor, dissinator dan juru bicara. Terakhir adalah (3) peranan sebagai pengambil keputusan. Sebagai pengambil keputusan pemimpin dapat berperan sebagai pengatur segala macam suberdaya yang ada. Berdasarkan ketiga peran pemimpin menurut Mintzberg tersebut maka beberapa kapasitas penting yang perlu dimiliki oleh seorang pemimpin yang meliputi komunikasi, pengambilan keputusan dan pendelegasian wewenang dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Selain itu dalam peranan informasional aspek terpenting adalah akuntabilitas informasi dari seorang pemimpin.

Secara umum para kepala desa merasa memiliki kemampuan di ketiga peran tersebut, namun hal tersebut perlu terus dikembangkan mengingat kondisi masyarakat desa yang beragam, peraturan yang seringkali mengalami perubahan, informasi yang tersedia di berbagai media (terutama media sosial) yang lebih sering diakses oleh masyarakat, sekalipun tidak semuanya merupakan informasi yang valid. Untuk menjalankan ketiga peran kepala desa sesuai kriteria kepemimpinan yang ideal mengalami berbagai kendala antara lain, beberapa kepala desa mengalami kesulitan menyampaikan berbagai program pemerintah maupun rencana pembangunan desanya, kemampuan komunikasi



## ***Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers***

*"Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan XIII"*

*17-18 Oktober 2023*

*Purwokerto*

---

terhadap berbagai kelompok masyarakat yang berbeda baik berdasarkan jenis kelamin, usia maupun tingkat pendidikan dan profesi menuntut kemampuan berkomunikasi yang lebih baik. Kerjasama kepala desa dengan para perangkat desa serta berbagai komponen masyarakat seperti tokoh masyarakat dan tokoh pemuda sering dimanfaatkan bagi pendelegasian tugas dalam menyampaikan informasi agar lebih mudah diterima oleh kelompoknya. Pemanfaatan teknologi informasi juga menjadi salah satu strategi dalam komunikasi di desa, meskipun karakteristik masyarakat yang berbeda tetap harus diimbangi dengan komunikasi yang bersifat interaksi langsung dengan berbagai komponen dalam masyarakat,

Pengambilan kebijakan merupakan suatu tindakan yang menentukan hasil dalam memecahkan masalah dengan memilih suatu jalur tindakan di antara beberapa alternatif yang ada melalui suatu proses mental dan berfikir logis dan juga mempertimbangkan semua pilihan alternatif yang ada yang mempunyai pengaruh negatif atau pun positif. Sedangkan identifikasi yang tepat merupakan bagian dari proses pengambilan kebijakan. Mengacu pada pendapat Syamsi (2002), dalam pengambilan keputusan ada 4 hal yang perlu diperhatikan yaitu tujuan, identifikasi alternatif, faktor yang tidak diketahui sebelumnya dan diperlukan sarana untuk mengukur keberhasilan. Tujuan tersebut harus disesuaikan dengan tingkat relevansi dengan kebutuhan, kejelasan dan kemampuan memprediksi sedangkan identifikasi alternatif maksudnya adalah untuk mencapai tujuan tersebut, pembuatan alternatif diperlukan sebagai bahan pertimbangan saat menentukan pilihan; Adapun faktor yang tidak dapat diketahui sebelumnya artinya adalah keberhasilan pemilihan alternatif itu baru dapat diketahui setelah putusan itu dilaksanakan. Keberhasilan implementasi kebijakan tersebut baru bisa dilihat di kemudian hari sehingga diperlukan kemampuan pimpinan untuk melakukan prediksi, Sarana untuk mengukur hasil yang dicapai. adalah masing-masing alternatif perlu disertai akibat positif dan negatifnya, termasuk sudah diperhitungkan adanya faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan.

Peran kepala desa dalam pengambilan kebijakan dirasakan belum optimal mengingat masih terdapat kendala dalam mengidentifikasi masalah maupun potensi yang akan digunakan untuk menyelesaikan berbagai masalah yang ada. Banyak aspek yang harus dipertimbangkan menuntut kapasitas kepala desa yang mumpuni dalam mengelola organisasi desa agar bisa merumuskan kebijakan yang tepat. Meskipun para kepala desa sudah memiliki kemampuan pada pemahaman tujuan serta membuat alternatif-alternatif kebijakan, namun dalam menganalisis setiap alternatif tersebut sangat diperlukan kemampuan untuk memilah berbagai faktor penguat dan faktor yang melemahkan dari alternatif-alternatif tersebut agar bisa tepat dalam melakukan pilihan diantara alternatif tersebut. Demikian juga kemampuan untuk mengantisipasi dengan menginventarisir faktor-faktor yang tidak bisa dikendalikan membutuhkan keahlian tersendiri yang masih menjadi kendala bagi sebagian kepala desa sehingga implementasi kebijakan menjadi kurang optimal ketika terjadi hal-hal yang diluar dugaan atau tidak bisa dikendalikan. Kemudian untuk pengukuran hasil pencapaian, para kepala desa memerlukan bimbingan untuk menentukan indikator keberhasilan serta sarana untuk mengukur keberhasilannya. Pada intinya para kepala desa masih sangat membutuhkan pelatihan maupun bimbingan teknis untuk dapat melakukan identifikasi dan pemetaan potensi maupun permasalahan serta melakukan pengambilan kebijakan yang efektif agar kebijakan dapat diimplementasikan dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

### **Asean Village Leader Programme dan ASEAN Village Network**

Selain berbagai masalah di atas, para kepala desa juga perlu menambah wawasan terkait pembangunan pedesaan di wilayah lain baik itu regional maupun global. Wawasan tersebut selain memberikan pengetahuan baru tentang pengelolaan desa, sekaligus menjadi inspirasi dan motivasi bagi para kepala desa untuk melakukan berbagai upaya terbaik untuk desanya. Begitu juga dengan menambah wawasan regional maupun global, akan menumbuhkan minat untuk menggali peluang-peluang kerjasama bagi pengembangan potensi desanya. Para kepala desa perlu mendapatkan pencerahan dari praktek baik yang dilakukan oleh para kepala desa di berbagai tempat baik nasional, regional maupun global. ASEAN sebagai institusi regional menyadari pentingnya pembangunan pedesaan mengingat sebagian besar masyarakat Asean tinggal di pedesaan.



## ***Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers***

*"Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan XIII"*  
17-18 Oktober 2023  
Purwokerto

---

Berawal dari tahun 2019 saat Indonesia mendapat apresiasi dari para peserta forum the 8th ASEAN Plus Three Village Leaders Exchange Programme. Pasalnya, hanya Indonesia yang mengirimkan kepala desa (kades) untuk berbicara di forum yang diikuti oleh seluruh negara ASEAN plus Tiongkok, Korea dan Jepang di Yunnan, Tiongkok dengan menyampaikan keberhasilan dana desa di Indonesia termasuk didesanya masing-masing (setkab,2019) Forum *the 8th ASEAN Plus Three Village Leaders Exchange Programme* ini bertujuan untuk membangun kapasitas para pemimpin-pemimpin yang ada didesa-desa dengan berbagi pengetahuan tentang pembangunan ekonomi, pengembangan infrastruktur dan pengembangan sumber daya manusia agar dapat lebih meningkatkan pengembangan masyarakat pedesaan dinegara-negara ASEAN. Melalui program ini para kepala desa dapat saling bertukar pengetahuan serta pengalaman mengenai praktek baik yang sudah dijalankan untuk pembangunan di desanya, serta terbukanya peluang kerjasama antar desa di ASEAN. Namun pada masa pandemic Covid-19, program ini tidak berlanjut, namun program kerjasama dalam kerangka Asean Village Leader tetap dilanjutkan

Dalam KTT ASEAN ke 42 di Labuan Bajo, Jejaring Desa ASEAN (ASEAN Village Network) telah disepakati pemimpin negara Ini langkah besar kolaborasi level terbawah dalam setiap pemerintahan hingga lintas negara untuk membangun dari pinggiran.(detik.com,2023) Hal ini dianggap sangat relevan mengingat desa-desa di pinggiran negara lah yang memiliki kesempatan terluas untuk bekerja sama dengan desa-desa di negara tetangga. Jejaring Desa ASEAN meliputi jaringan desa, kelompok desa, dan asosiasi desa. Kelembagaan ini bersifat terbuka, mandiri, dan mengutamakan pendekatan *bottom up* dari seluruh negara anggota ASEAN. Pertemuan mereka membahas isu desa-desa di Asia Tenggara, mendiskusikan dan mempertukarkan isu terkait pembangunan pedesaan, penanggulangan kemiskinan, dan kebijakan pembangunan desa di masa mendatang.

Fokus dari Asean Village Network ini adalah bersama-sama meningkatkan taraf hidup masyarakat kawasan berkelanjutan dengan tiga fokus program kolaboratif, yakni desa wisata, desa digital serta pengembangan produk unggulan atau One Village One Product (OVOP). Menurut Menteri Desa PDTT dengan pengembangan Desa Wisata yang dilakukan secara berjejaring, antardesa di ASEAN nantinya akan saling terkoneksi secara promosi satu dengan lain. Sementara fokus kedua Jejaring Desa ASEAN, yakni Desa Digital, pengembangannya dinilai penting untuk mempercepat literasi digital di tingkat desa agar masyarakat tidak mudah terpapar berita-berita palsu atau hoaks. Sedangkan yang ketiga, One Village One Product menjadikan setiap desa mempunyai produk-produk unggulan yang bisa bekerja sama dengan lintas negara.

Jejaring Desa ASEAN bertujuan untuk menyediakan platform untuk seluruh komunitas dan partisipasi inklusif sehingga pedesaan dapat berkontribusi dan mendapat manfaat dari pembangunan; memfasilitasi kolaborasi dan kerja sama antar desa untuk mendukung transformasi desa; dan memfasilitasi akses produk pedesaan ke pasar regional dan internasional. ASEAN Village Network juga dimaksudkan untuk memperkuat identitas ASEAN di komunitas desa (asean.id,2023). Dengan terbentuknya jejaring desa Asean maka terbuka kesempatan kerjasama hingga ke tingkat desa dalam berbagai aspek, antara lain pembentukan Badan Usaha Milik Desa Lintas Negara (Bumdes multinasional) sebagai bentuk kolaborasi positif antar Bumdes antar negara di ASEAN serta berbagai kesempatan kerjasama lainnya yang bertujuan memajukan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu sangat perlu bagi para kepala desa untuk mendapatkan wawasan mengenai pembangunan pedesaan melalui Jejaring Desa ASEAN agar mampu memaksimalkan perannya dalam mengidentifikasi potensi, memecahkan persoalan pembangunan desa serta mengambil kebijakan yang efektif.

### **KESIMPULAN**

Kepala desa di Kabupaten Banyumas mengalami berbagai permasalahan dalam menjalankan tugasnya sebagai pelaksana pembangunan desa antara lain dalam mengidentifikasi potensi desa, mengatasi persoalan pembangunan di desa, mengoptimalkan perannya untuk mengambil kebijakan yang efektif serta perlunya wawasan nasional, regional maupun global tentang pengelolaan



## **Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers**

*"Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan XIII"*  
17-18 Oktober 2023  
Purwokerto

---

pembangunan desa sebagai referensi yang mampu menjadi motivasi maupun inspirasi bagi pembangunan di desanya.

Pemberdayaan kepala desa di ASEAN dimulai dengan program pertukaran kepala desa ASEAN yang kemudian dilanjutkan dengan pembentukan Jejaring Desa ASEAN. Dengan terbentuknya Jejaring Desa ASEAN maka terbuka kesempatan yang lebih luas bagi para kepala desa untuk bertukar pengalaman tentang praktek baik pembangunan desa, kerjasama dalam bidang pariwisata, desa digital serta penguatan produk lokal melalui *one village one product* dan kerjasama dalam bentuk Bumdes regional atau Bumdes Multilateral.

### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Terimakasih kepada Universitas Jenderal Soedirman yang sudah memberikan pendanaan kegiatan ini

### **DAFTAR PUSTAKA**

- A. Halim Iskandar, *SDGs DESA : Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan* (20: Buku Obor, 2020),  
[https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=yfoIEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=sdgs+desa&ots=YGAPBaozaI&sig=uQ41xewdGu9XBjdsOhmpWOIBAew&redir\\_esc=y#v=onepage&q=sdgs%20desa&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=yfoIEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=sdgs+desa&ots=YGAPBaozaI&sig=uQ41xewdGu9XBjdsOhmpWOIBAew&redir_esc=y#v=onepage&q=sdgs%20desa&f=false)  
<https://asean.org/asean-plus-three-countries-village-leaders-to-accelerate-poverty-reduction/> yang diakses 31 Oktober 2021  
<https://asean2023.id/id/news/1st-asean-village-network-meeting-discusses-framework-actionplan#:~:text=Jejaring%20Desa%20ASEAN%20bertujuan%20untuk,akses%20produk%20perdesaan%20ke%20pasar>  
<https://www.masterplandes.com/penataan-desa/memulai-identifikasi-potensi-dan-masalah-yang-ada-di-desa/>  
<https://www.msn.com/id-id/ekonomi/ekonomi/ini-cara-desa-pandak-ciptakan-kemandirian-ekonomi/ar-AAFJdqg> diakses 3 Nopember 2020  
Jejaring Desa ASEAN selengkapnya <https://news.detik.com/kolom/d-6776964/jejaring-desa-asean>  
Kisacik, Harun (2017), "The Corporate Sustainability Solution: Triple Bottom Line", *The Journal of Accounting and Finance* July 2017 Special Issue  
Mintzberg, Henry. (2004) *Leadership and Management Development: an Afterword*, The Academy of Management Executive, Vol. 18, No. 3 (august, 2004), 140-142  
Rasito, Kepala Desa Pandak, dalam wawancara 6 November 2021 di kantor kepala Desa  
Reza (2019), *Indonesia Kirim Kepala Desa ke Forum The 8th ASEAN Plus Three Village Leaders Exchange Programme* dalam <https://www.liputan6.com/news/read/3962721/indonesia-kirim-kepala-desa-ke-forum-the-8th-asean-plus-three-village-leaders-exchange-programme>  
Sekretariat ASEAN (2019), *Kades dari Indonesia Berbicara di Forum Asean di Tiongkok*,  
<https://setnasasean.id/news-events/read/kades-dari-indonesia-berbicara-di-forum-asean-di-tiongkok>  
Sekretariat Cabinet (2019) *3 Kepala Desa Dikirim ke Forum the 8<sup>th</sup> ASEAN plus Three Village Leaders Exchange Programme*, <https://setkab.go.id/3-kepala-desa-dikirim-ke-forum-the-8th-asean-plus-three-village-leaders-exchange-programme/>  
Syamsi, Ibnu. 2002. *Pengambilan Keputusan dan Sistem Informasi*. Jakarta : Bumi Aksara